



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 800 /B.07/HK/2024**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA
DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung Nomor: 800.1.1.1/302/V.03/2024 Hal : Penyampaian Hasil Penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan, tanggal 24 Oktober 2024;

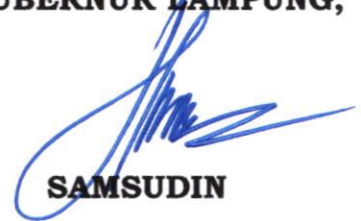
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/737/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 -11- 2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/800/B.07/HK/2024
 TANGGAL: 28 - 11 - 2024

**REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)
 DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI**

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	EFEKTIFITAS UNIT (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI	1	1,277	1	0	A		
2	- SEKRETARIS	1	1,424	1	0	A	7,875	A
3	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	11	11,232	11	0	A		
4	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	-2	A		
5	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	11,968	12	-7	A		
6	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,600	2	-2	A		
7	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	12,236	12	-12	A		
8	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	6,651	7	-7	A		
9	- KEPALA SUB BAGIAN UMUM	1	1,200	1	0	A		
10	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4,352	4	-1	A		
11	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	-2	A		
12	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	23,748	24	-23	A		
13	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	3,550	4	-2	A		
14	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	1,568	2	0	A		
15	- OPERATOR ALAT BERAT	1	4,320	4	-3	A		
16	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	10,125	10	-10	A		
17	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	10,484	10	-10	A		
18	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	18,294	18	-18	A		
19	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1	1,312	1	0	A	4,663	A
20	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4,179	4	-1	A		
21	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	10,368	10	-9	A		
22	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,600	2	-2	A		
23	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	4,177	4	-4	A		
24	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN	1	1,120	1	0	A		
25	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4,352	4	-1	A		
26	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	3	8,168	8	-5	A		
27	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	6,984	7	-7	A		
28	KEPALA SEKSI TATA TEKNIK PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	1	1,331	1	0	A		
29	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	4,352	4	0	A		
30	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	4,997	5	0	A		
31	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1,152	1	-1	A		
32	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	6,285	6	-6	A		
33	KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	1	1,324	1	0	A	6,086	A
34	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	3,640	4	0	A		
35	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	-2	A		
36	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	4	22,739	23	-19	A		
37	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,600	2	-2	A		
38	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	6,012	6	-6	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	EFEKTIFITAS UNIT (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN	1	1,312	1	0	A		
40	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4,352	4	-1	A		
41	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	-2	A		
42	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	7	6,815	7	0	A		
43	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3,564	4	-4	A		
44	KEPALA SEKSI TATA TEKNIK PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	0	1,312	1	-1	A		
45	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	9	9,751	10	-1	A		
46	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	13,388	13	-13	A		
47	KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI	1	1,336	1	0	A	2,080	A
48	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	1,647	2	-2	A		
49	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	-2	A		
50	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	3,462	3	-2	A		
51	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,334	2	-2	A		
52	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,899	2	-2	A		
53	KEPALA SEKSI PENGATURAN KONSTRUKSI	1	1,350	1	0	A		
54	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	1,647	2	-2	A		
55	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	-2	A		
56	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,574	2	-1	A		
57	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3,512	4	-4	A		
58	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI	1	1,235	1	0	A		
59	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	1,647	2	0	A		
60	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,832	2	-2	A		
61	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,334	2	-2	A		
62	KEPALA BIDANG BINA PROGRAM	1	1,336	1	0	A	3,459	A
63	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	1,647	2	-2	A		
64	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	2,064	2	-2	A		
65	PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,899	2	-2	A		
66	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	5,638	6	-6	A		
67	KEPALA SEKSI PROGRAM DAN ANGGARAN	1	1,446	1	0	A		
68	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	4,352	4	-3	A		
69	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	3	4,544	5	-2	A		
70	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	5,394	5	-5	A		
71	KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN DAN DATA	1	1,322	1	0	A		
72	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	1,647	2	-1	A		
73	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	5,568	6	-4	A		
74	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	5,984	6	-6	A		
75	KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I	1	1,408	1	0	A	4,252	A
76	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,219	1	0	A		
77	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	6	6,160	6	0	A		
78	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	-2	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	EFEKTIFITAS UNIT (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	4	17,984	18	-14	A		
80	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	5,495	5	0	A		
81	- OPERATOR ALAT BERAT	1	4,320	4	-3	A		
82	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3,512	4	-4	A		
83	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	-2	A		
84	- KEPALA SEKSI JALAN	1	1,370	1	0	A		
85	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4,352	4	-1	A		
86	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	3	3,048	3	0	A		
87	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	2,709	3	-3	A		
88	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,899	2	-2	A		
89	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	5,984	6	-6	A		
90	- KEPALA SEKSI JEMBATAN	1	1,184	1	0	A		
91	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	4,352	4	-3	A		
92	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,417	2	-2	A		
93	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	5,796	6	-6	A		
94	KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II	1	1,408	1	0	A	3,475	A
95	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,219	1	0	A		
96	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	4,352	4	-3	A		
97	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	-2	A		
98	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	14,784	15	-13	A		
99	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	5,837	6	-4	A		
100	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	2,064	2	0	A		
101	- OPERATOR ALAT BERAT	1	4,320	4	-3	A		
102	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	3,616	4	-4	A		
103	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3,512	4	-4	A		
104	- KEPALA SEKSI JALAN	1	1,372	1	0	A		
105	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	4,352	4	-2	A		
106	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	3	2,576	3	0	A		
107	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1,152	1	-1	A		
108	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,899	2	-2	A		
109	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,124	1	-1	A		
110	- KEPALA SEKSI JEMBATAN	1	1,380	1	0	A		
111	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4,352	4	-1	A		
112	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,417	2	-2	A		
113	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3,280	3	-3	A		
114	KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III	1	1,421	1	0	A	3,560	A
115	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,219	1	0	A		
116	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	4,352	4	-2	A		
117	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	3,440	3	-2	A		
118	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	13,344	13	-11	A		
119	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	3,856	4	-4	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	EFEKTIFITAS UNIT (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	- OPERATOR ALAT BERAT	1	4,320	4	-3	A		
121	- KEPALA SEKSI JALAN	1	1,324	1	0	A		
122	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4,352	4	-1	A		
123	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	2,064	2	-2	A		
124	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1,820	2	-2	A		
125	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3,284	3	-3	A		
126	- KEPALA SEKSI JEMBATAN	1	1,368	1	0	A		
127	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	3,920	4	-3	A		
128	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,417	2	-2	A		
129	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	-2	A		
130	- KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV	1	1,398	1	0	A	3,961	A
131	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,219	1	0	A		
132	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	4,352	4	0	A		
133	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	3,440	3	-2	A		
134	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	3	18,087	18	-15	A		
135	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	3,696	4	-3	A		
136	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	1,142	1	0	A		
137	- OPERATOR ALAT BERAT	1	4,320	4	-3	A		
138	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,125	1	-1	A		
139	- KEPALA SEKSI JALAN	1	1,389	1	0	A		
140	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	4,544	5	-1	A		
141	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	2,064	2	-1	A		
142	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3,984	4	-4	A		
143	- KEPALA SEKSI JEMBATAN	1	1,352	1	0	A		
144	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4,352	4	-1	A		
145	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	-2	A		
146	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	5,984	6	-6	A		
147	- KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V	1	1,408	1	0	A	3,820	A
148	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,336	1	0	A		
149	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4,352	4	-1	A		
150	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	-2	A		
151	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	3	14,784	15	-12	A		
152	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	2,064	2	-2	A		
153	- OPERATOR ALAT BERAT	0	4,320	4	-4	A		
154	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	5,984	6	-6	A		
155	- KEPALA SEKSI JALAN	1	1,352	1	0	A		
156	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4,352	4	-1	A		
157	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	2,064	2	-1	A		
158	- KEPALA SEKSI JEMBATAN	1	1,380	1	0	A		
159	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	4,352	4	-1	A		
160	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,417	2	-2	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/ EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/ KEKURANGAN	PJ	EFEKTIFITAS UNIT (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
161	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	-2	A		
162	KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI	1	1,408	1	0	A	3,112	A
163	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,356	1	0	A		
164	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	4,544	5	-1	A		
165	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	-2	A		
166	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	6,837	7	-7	A		
167	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	3,696	4	-3	A		
168	- OPERATOR ALAT BERAT	2	4,320	4	-2	A		
169	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	-2	A		
170	- KEPALA SEKSI JALAN	0	1,372	1	-1	A		
171	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	4,352	4	0	A		
172	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	2,064	2	0	A		
173	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	-2	A		
174	- KEPALA SEKSI JEMBATAN	1	1,372	1	0	A		
175	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	4,352	4	-2	A		
176	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,417	2	-2	A		
177	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,944	3	-3	A		
178	KEPALA UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	1	1,408	1	0	A	3,199	A
179	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,411	1	0	A		
180	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	5	4,544	5	0	A		
181	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	-2	A		
182	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	6,837	7	-7	A		
183	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	4,048	4	-2	A		
184	- OPERATOR ALAT BERAT	0	4,320	4	-4	A		
185	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	3,284	3	-3	A		
186	KEPALA SEKSI PENGUJIAN DAN ANALISIS CAMPURAN	1	1,398	1	0	A		
187	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	4,352	4	-2	A		
188	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	2,064	2	-1	A		
189	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	5,160	5	-5	A		
190	KEPALA SEKSI PENGUJIAN MATERIAL/BAHAN	1	1,226	1	0	A		
191	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	4,352	4	-2	A		
192	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	2,064	2	-1	A		
193	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,306	2	-2	A		
	Jumlah	232	762,061	735	-503		4,128	A

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

**2.1 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
 DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG**

<p>KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI MUHAMMAD TAUFIQUELLAH, S.T., M.T. Pembina Tingkat I NIP. 19721120 200212 1 004</p>	<p>KEPALA BIDANG BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI Yudi Aryanto, S.T., M.T.</p>	<p>KEPALA BIDANG BINA PROGRAM M. Abdillah Sjaheru, S.T., M.T.</p>
<p>SEKRETARIS DINAS Sukmawan Hendriyanto, S.T., M.T.</p>	<p>KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN Tri Susilowati, S.T., M.T.</p>	<p>KEPALA SEKSI PROGRAM DAN ANGGARAN Angri Hasdiandi, S.T., M.URP.</p>
<p>SUB BAGIAN UMUM Fika Lia Utami, S.STP., M.M.</p>	<p>KEPALA SEKSI PENGANTARAN KONSTRUKSI Fasheria Khendia U, S.T., M.M.</p>	<p>PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN 1. Neliyanti, S.T.</p>
<p>PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN 1. I. Ngurah Putu Ferry W, S.T. 2. Jumiaty, S.E. 3. Evi Maria, S.Sos.</p>	<p>PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN 1. Kurnia Putri, S.T., M.T. 2. Atie Septyawatie, S. Psi 3. Agustin Linawati, SE</p>	<p>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Septina Sari, A.Md. 2. Sugito 3. Hendra Dwi Jayanto</p>
<p>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI Belum Ada Pegawai</p>	<p>PENGELOLAA LAYANAN OPERASIONAL Belum Ada Pegawai</p>	<p>PENATA LAYANAN OPERASIONAL Belum Ada Pegawai</p>
<p>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Sadli Izazi</p>	<p>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Joni Haryono</p>	<p>PENATA LAYANAN OPERASIONAL Belum Ada Pegawai</p>
<p>OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 1. Zuikafli 2. Zainudin</p>	<p>OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 1. Mailina Siregar 2. Ike Niawati 3. Aang Hermawan 4. Turni Rahayu 5. Erik Ramadona 6. Eko Budi Setiawan 7. Untung Setiawan</p>	
<p>KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN Asep Wirakarsa, S.T., M.T.</p>	<p>KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN Ibrahim, S.T., M.T.</p>	
<p>KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN 1. Achmad Andrico, .S.T 2. Haryono, S.T., M.T. 3. Novida Rakhmawaty, S.T., M.T.</p>	<p>PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN 1. Kurnia Putri, S.T., M.T. 2. Atie Septyawatie, S. Psi 3. Agustin Linawati, SE</p>	
<p>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Ratnawati Azis, S.Sos. 2. Heryanto 3. Kasiman</p>	<p>PENGELOLAA LAYANAN OPERASIONAL Belum Ada Pegawai</p>	
<p>PENATA LAYANAN OPERASIONAL Belum Ada Pegawai</p>		

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Shiswandi 2. Kun Hardono 3. Muhammad Ali 4. Cerah Wulan Sari 5. Gusnida

PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Belum Ada Pegawai

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai

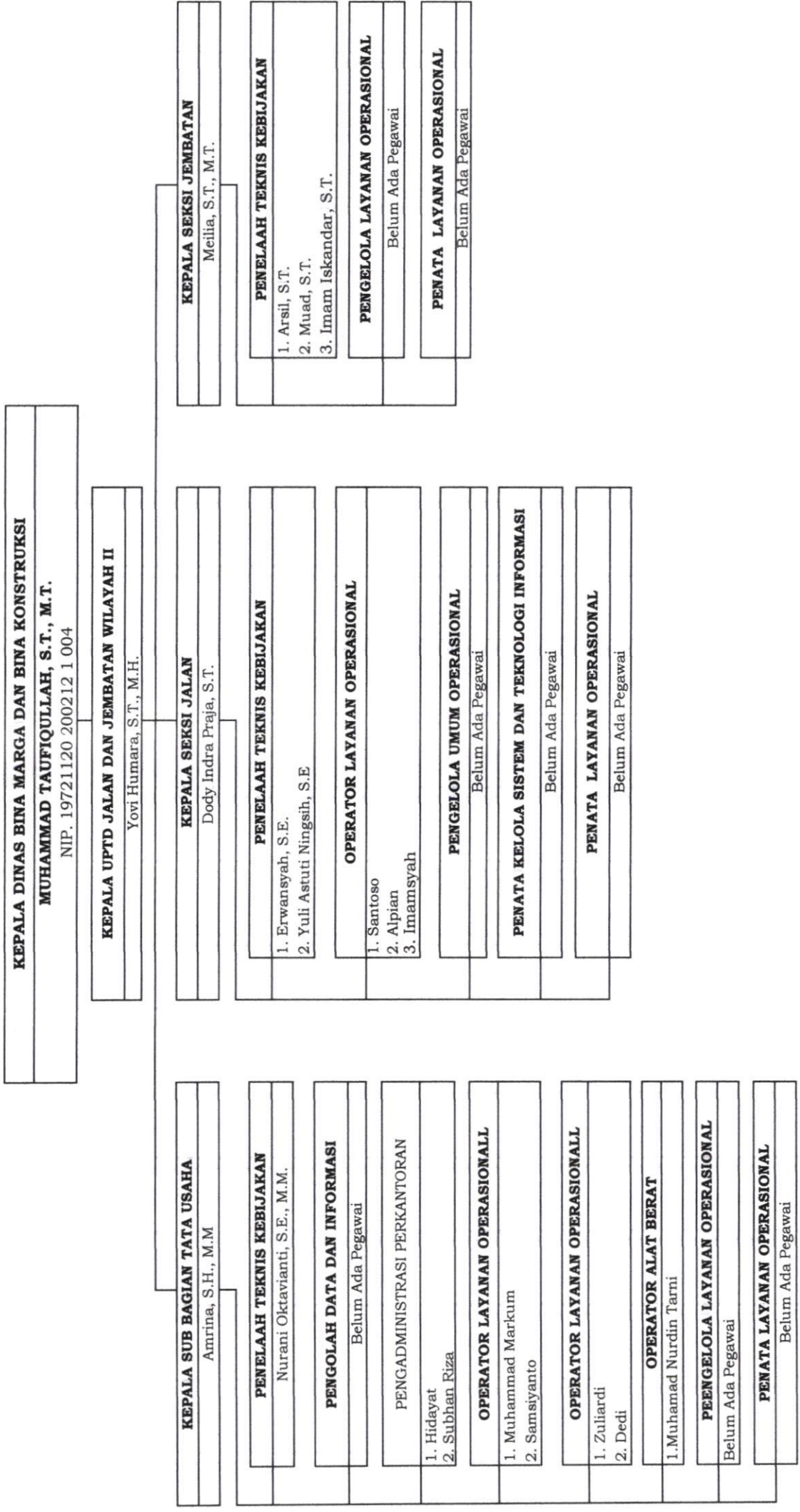
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Belum Ada Pegawai

PENATA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai

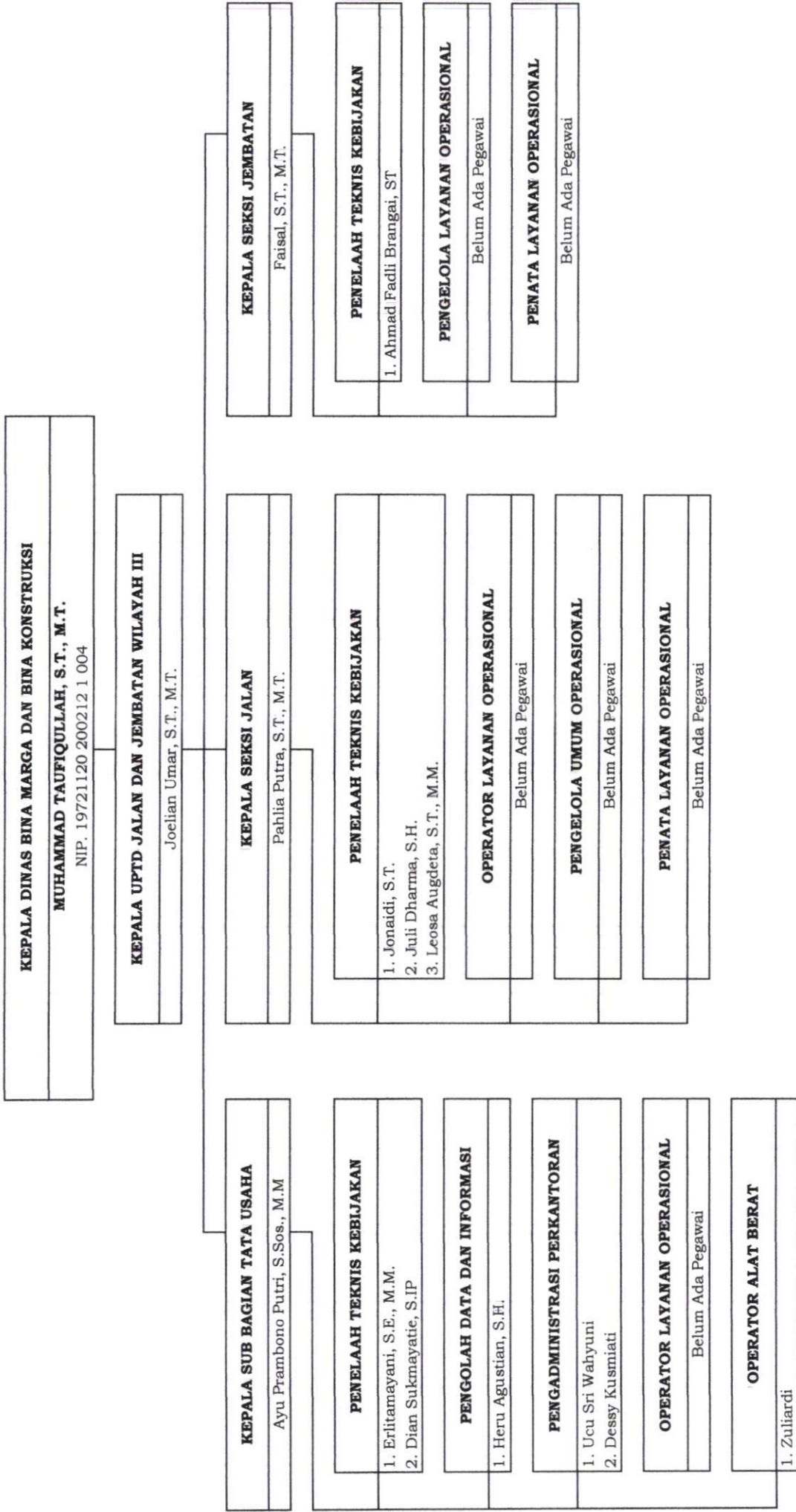
2.2 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANAHASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG

<p>KEPALA DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI MUHAMMAD TAUFUQLLAH, S.T., M.T. NIP. 19721120 200212 1 004</p>	
<p>KEPALA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I Ahmad Barden Mogni, S.T.</p>	<p>KEPALA SEKSI JEMBATAN Burlian, S.T.</p>
<p>KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA Alviridian Oktafianus, S.E., M.M</p>	<p>KEPALA SEKSI JALAN Yenni Yunita Sari, S.T.</p>
<p>PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN 1. Desta Andriyani, S.IP 2. Rahmat Septiana, S.E. 3. Reni Kristianti, S.M., M.M. 4. Dra. Risawati, M.M. 5. Nurjayati, S.E. 6. Alvy Riza, S.E., M.M.</p>	<p>PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN 1. Cahyo Budi Santoso, S.T. 2. Suwanto, S.T. 3. Siti Mutmainah, S.T., M.T</p>
<p>PENGOLAH DATA DAN INFORMASI Belum Ada Pegawai</p>	<p>OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 1. Andi Yunata Christianandar 2. Yudi Ananto Prasetyo 3. Edi Madrustam</p>
<p>PENGADMINISTRASI PERKANTORAN</p>	<p>PENGELOLA UMUM OPERASIONAL Belum Ada Pegawai</p>
<p>1. Siti Nurbaiti 2. Suparmi 3. Dwina Yulianti 4. Muthakim</p>	<p>PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI Belum Ada Pegawai</p>
<p>OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL 1. Tanszly Artes 2. Ristanto 3. Fathurahman 4. Muhammad Huseeni 5. Hendri Osfian</p>	<p>PENATA KELOLA LAYANAN OPERASIONAL Belum Ada Pegawai</p>
<p>OPERATOR ALAT BERAT 1. Mukmin</p>	<p>PENATA KELOLA LAYANAN OPERASIONAL Belum Ada Pegawai</p>
<p>PEENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL Belum Ada Pegawai</p>	<p>PENATA KELOLA LAYANAN OPERASIONAL Belum Ada Pegawai</p>

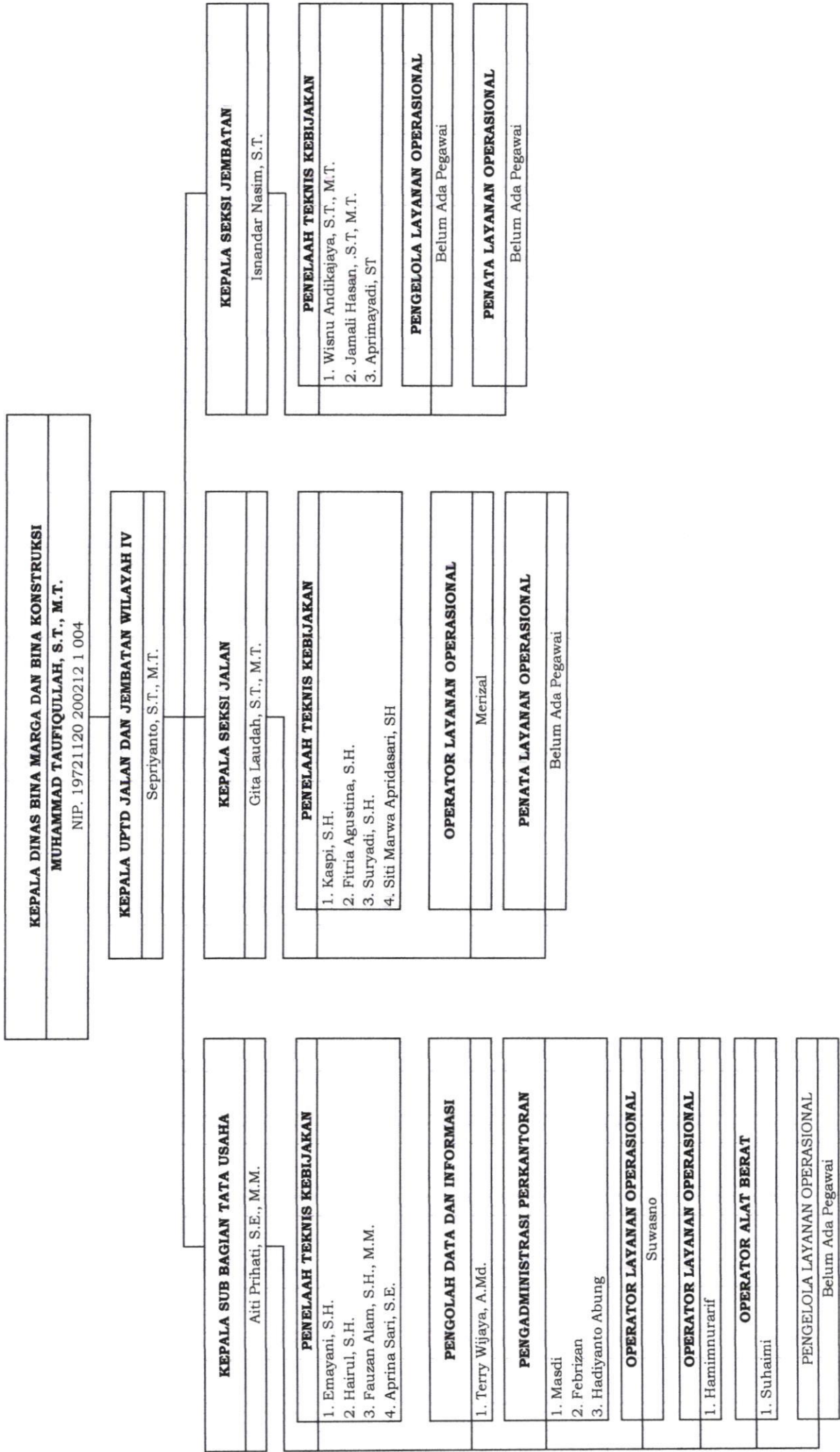
2.3 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANAHASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG



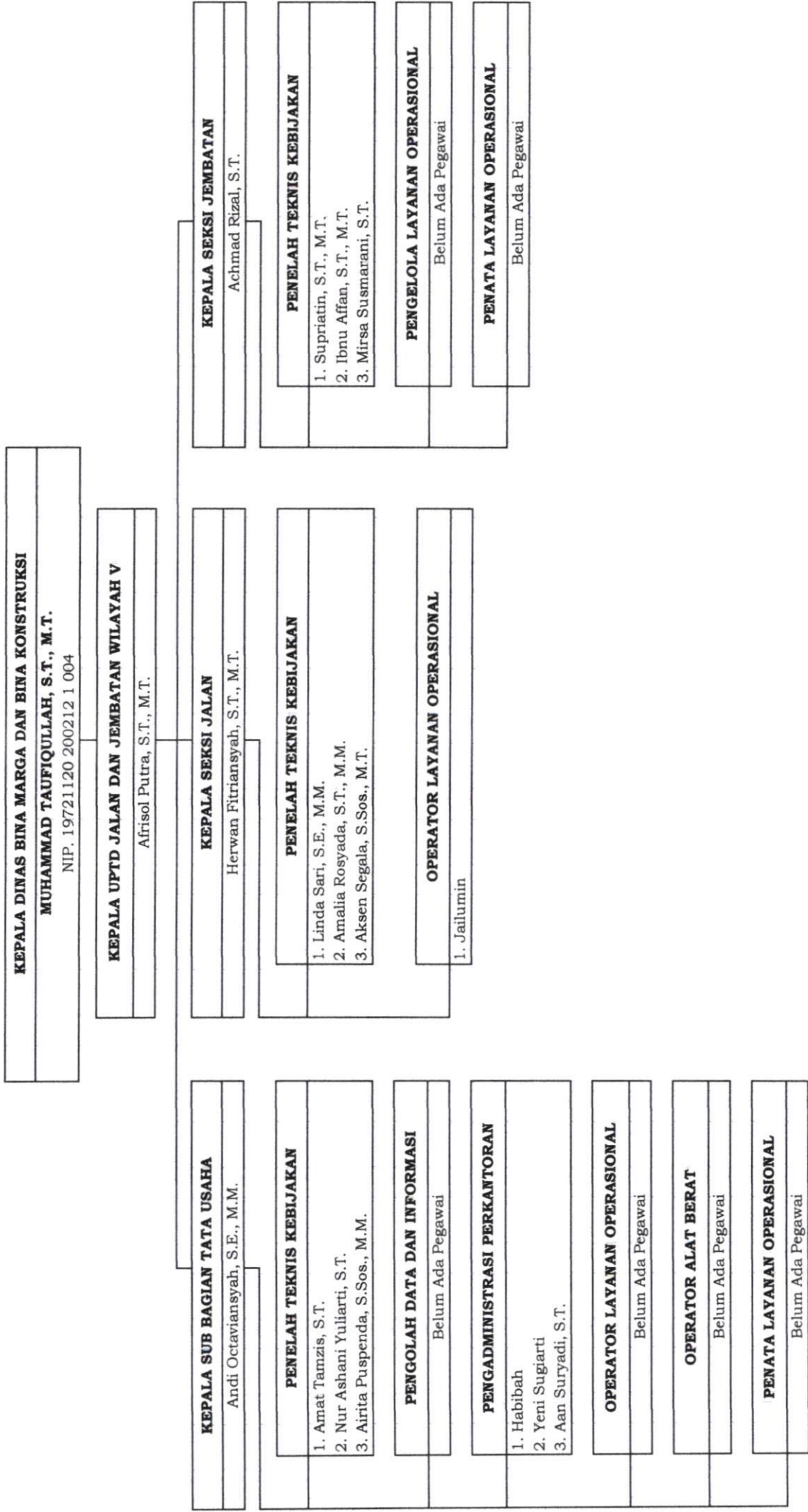
2.4 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANAHASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG



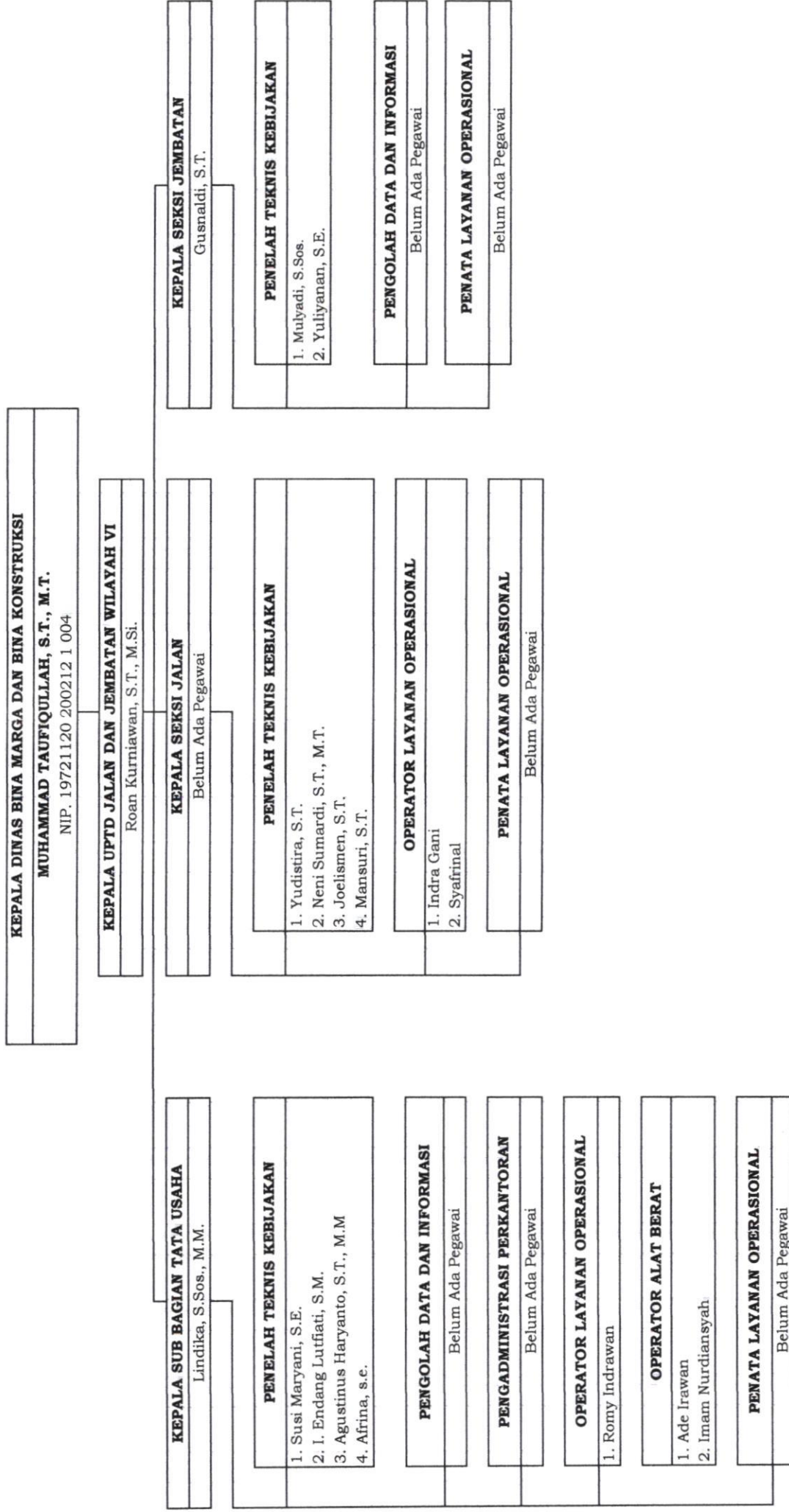
2.5 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANAHASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG



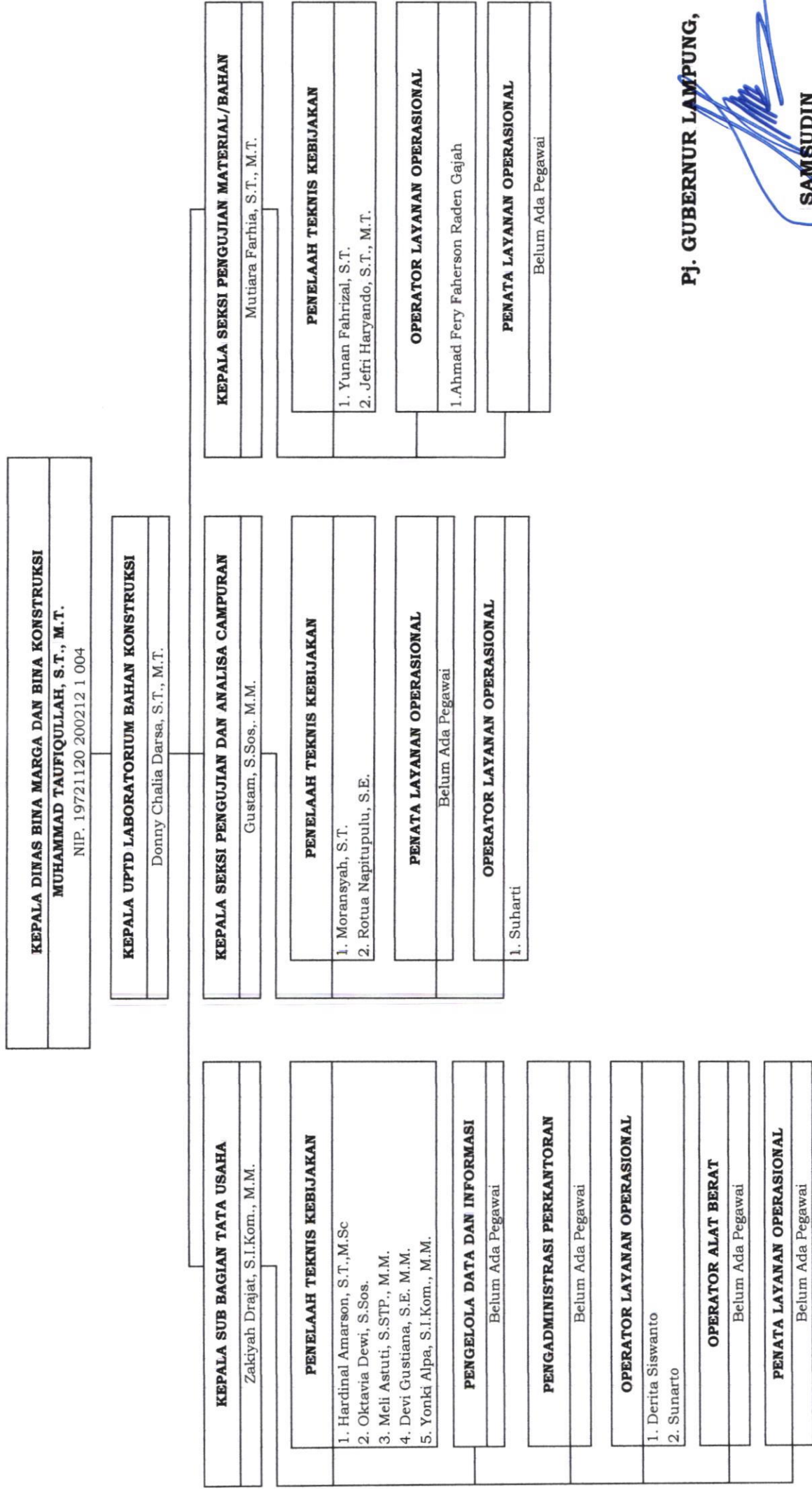
2.6 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANAHASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG



2.7 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANAHASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG



2.8 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANAHASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG



Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ B.07/HK/2024
 TANGGAL: 2024

**3.1 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG**

KELAS JABATAN	B	K	S
KELAS 15	1	1	0
KELAS 12	1	1	0
KELAS 11	4	4	0
KELAS 9	8	9	-1
KELAS 7	44	156	-112
KELAS 6	0	37	-37
KELAS 5	36	117	-81
KELAS 3	2	2	0
KELAS 1	0	11	-11
JUMLAH	96	338	-242

Kls	B	K	S
15	1	1	0

SEKRETARIS DINAS	Kls	B	K	S
	12	1	1	0

SUB BAGIAN UMUM	Kls	B	K	S
	9	1	1	0
PENELAHAH TEKNIKIS KEBLAJAKAN	7	3	4	-1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	6	0	2	-2
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	24	-23
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	2	4	-2
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	3	2	2	0
OPERATOR ALAT BERAT	5	1	4	-3
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	0	10	-10
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	10	-10
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	0	18	-18

KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	Kls	B	K	S
	11	1	1	0

KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN JALAN	Kls	B	K	S
	9	1	1	0
PENELAHAH TEKNIKIS KEBLAJAKAN	7	3	4	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	3	8	-5
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	7	-7

KEPALA SEKSI TATA TEKNIKIS PEMBANGUNAN JALAN DAN JABATAN	Kls	B	K	S
	9	1	1	0
PENELAHAH TEKNIKIS KEBLAJAKAN	7	4	4	0
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	5	5	0
PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	1	0	1	1
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	6	-6

KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	Kls	B	K	S
	11	1	1	0

KEPALA SEKSI PEMELIHARAAN JALAN	Kls	B	K	S
	9	1	1	0
PENELAHAH TEKNIKIS KEBLAJAKAN	7	3	4	-1
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	0	2	-2
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	5	7	7	0

KEPALA SEKSI TATA TEKNIKIS PEMELIHARAAN JALAN DAN JABATAN	Kls	B	K	S
	9	0	1	-1
PENELAHAH TEKNIKIS KEBLAJAKAN	7	9	10	-1
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	13	-13

KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI	Kls	B	K	S
	11	1	1	0

KEPALA SEKSI PENGATURAN KONSTRUKSI	Kls	B	K	S
	9	1	1	0
PENELAHAH TEKNIKIS KEBLAJAKAN	7	0	2	-2
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	6	0	2	-2
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	2	-1
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	4	-4

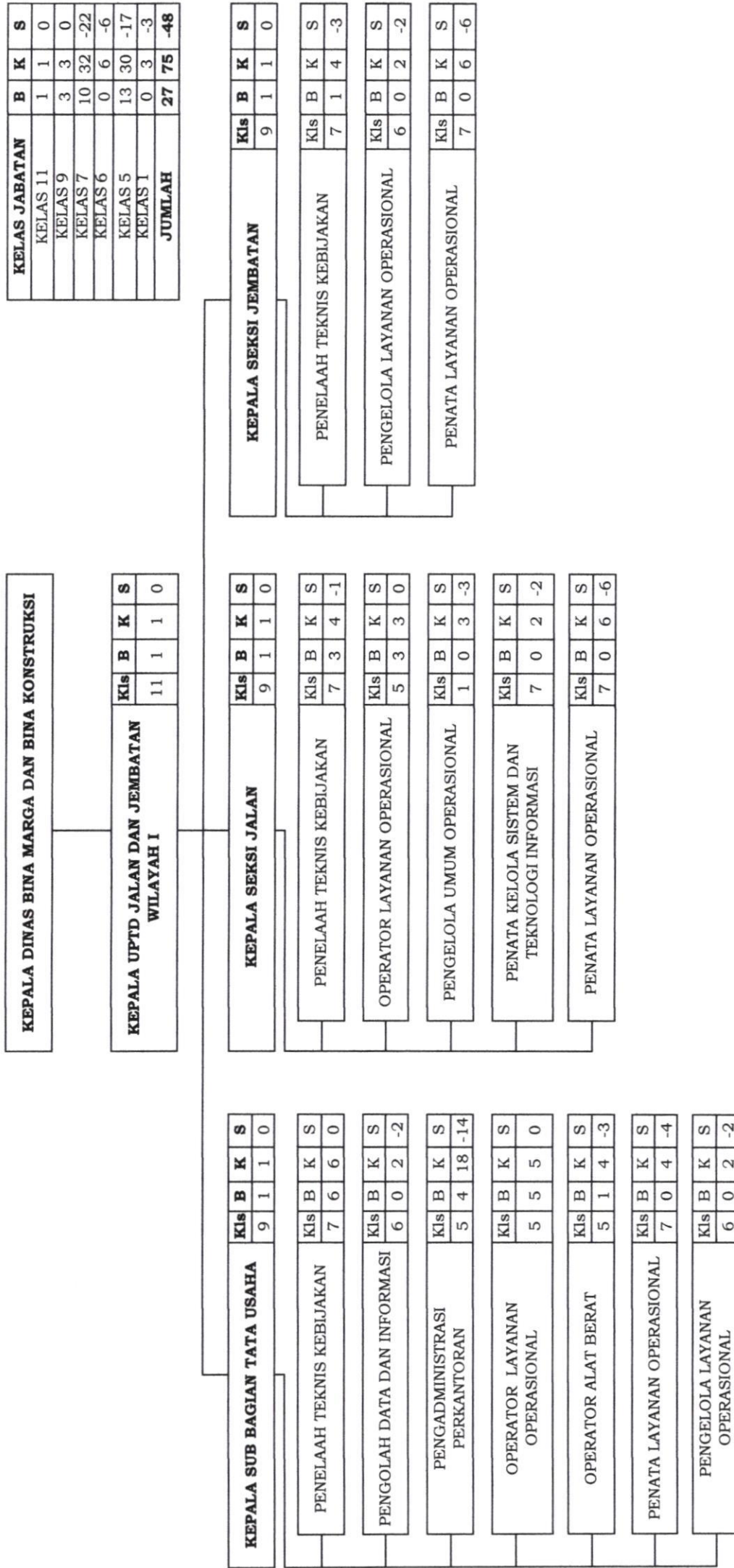
KEPALA SEKSI PEMERDAYAAN JASA KONTROKSI	Kls	B	K	S
	9	1	1	0
PENELAHAH TEKNIKIS KEBLAJAKAN	7	2	2	0
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	0	2	-2
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	2	-2

KEPALA BIDANG BINA PROGRAM	Kls	B	K	S
	11	1	1	0

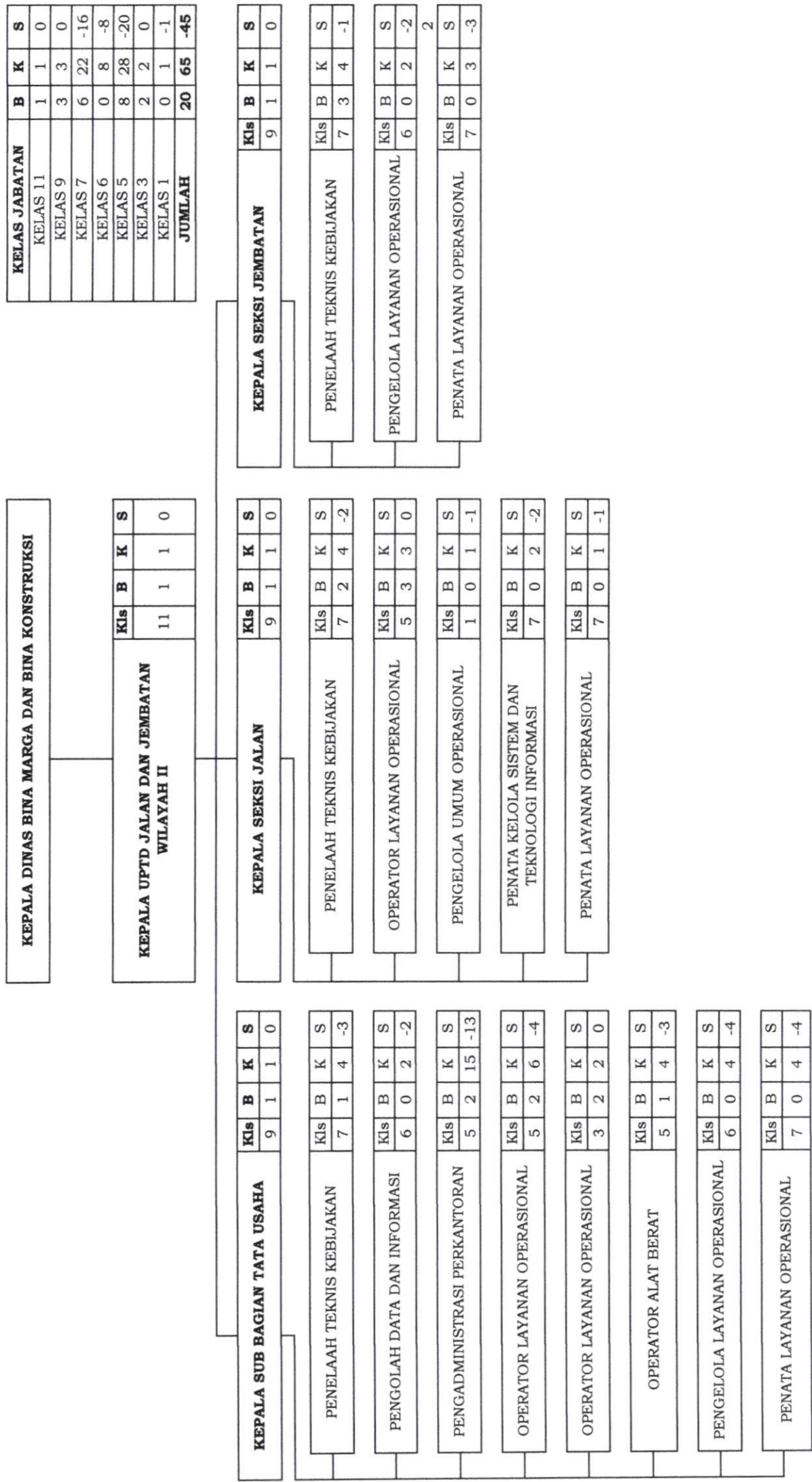
KEPALA SEKSI PROGRAM DAN ANGGARAN	Kls	B	K	S
	9	1	1	0
PENELAHAH TEKNIKIS KEBLAJAKAN	7	1	4	-3
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	3	5	-2
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	5	-5

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN JARINGAN DAN DATA	Kls	B	K	S
	9	1	1	0
PENELAHAH TEKNIKIS KEBLAJAKAN	7	1	2	-1
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	5	2	6	-4
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	7	0	6	-6

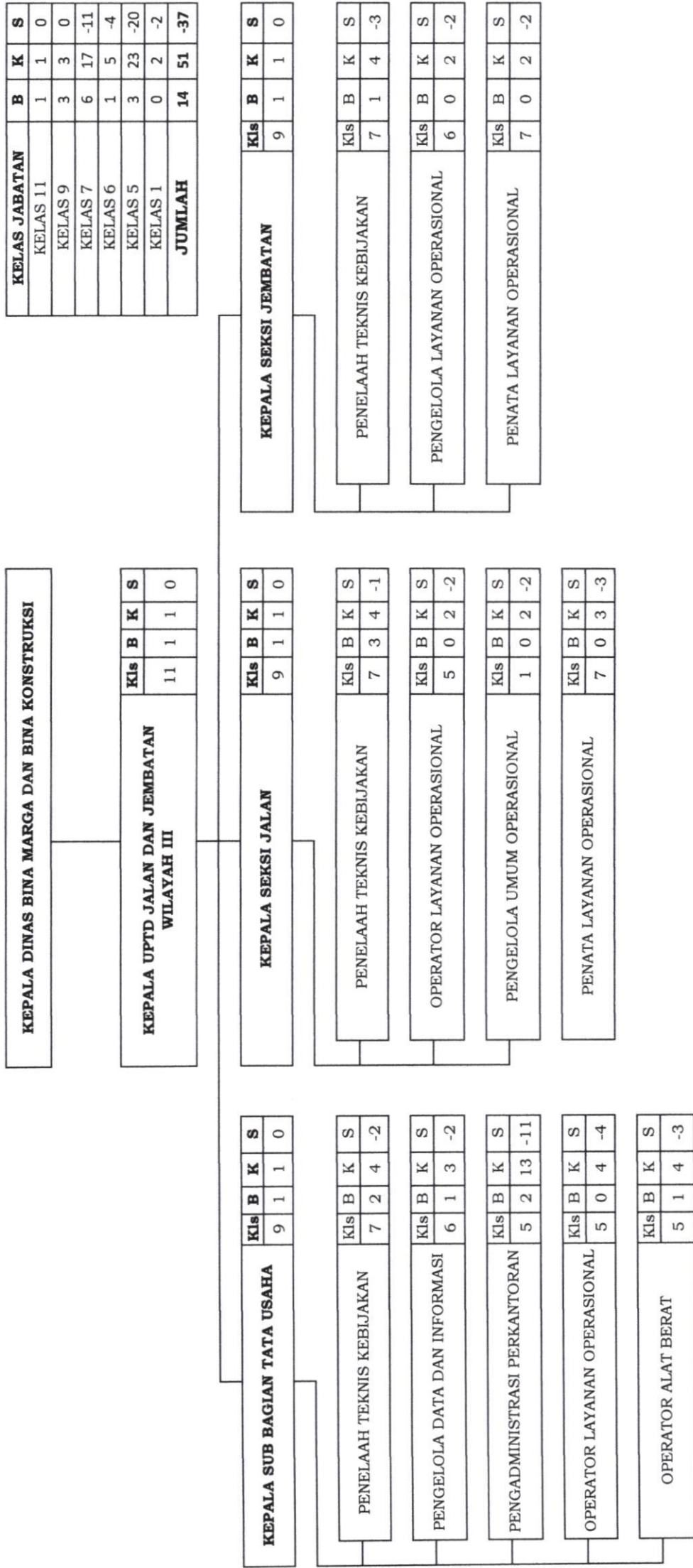
3.2. PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG



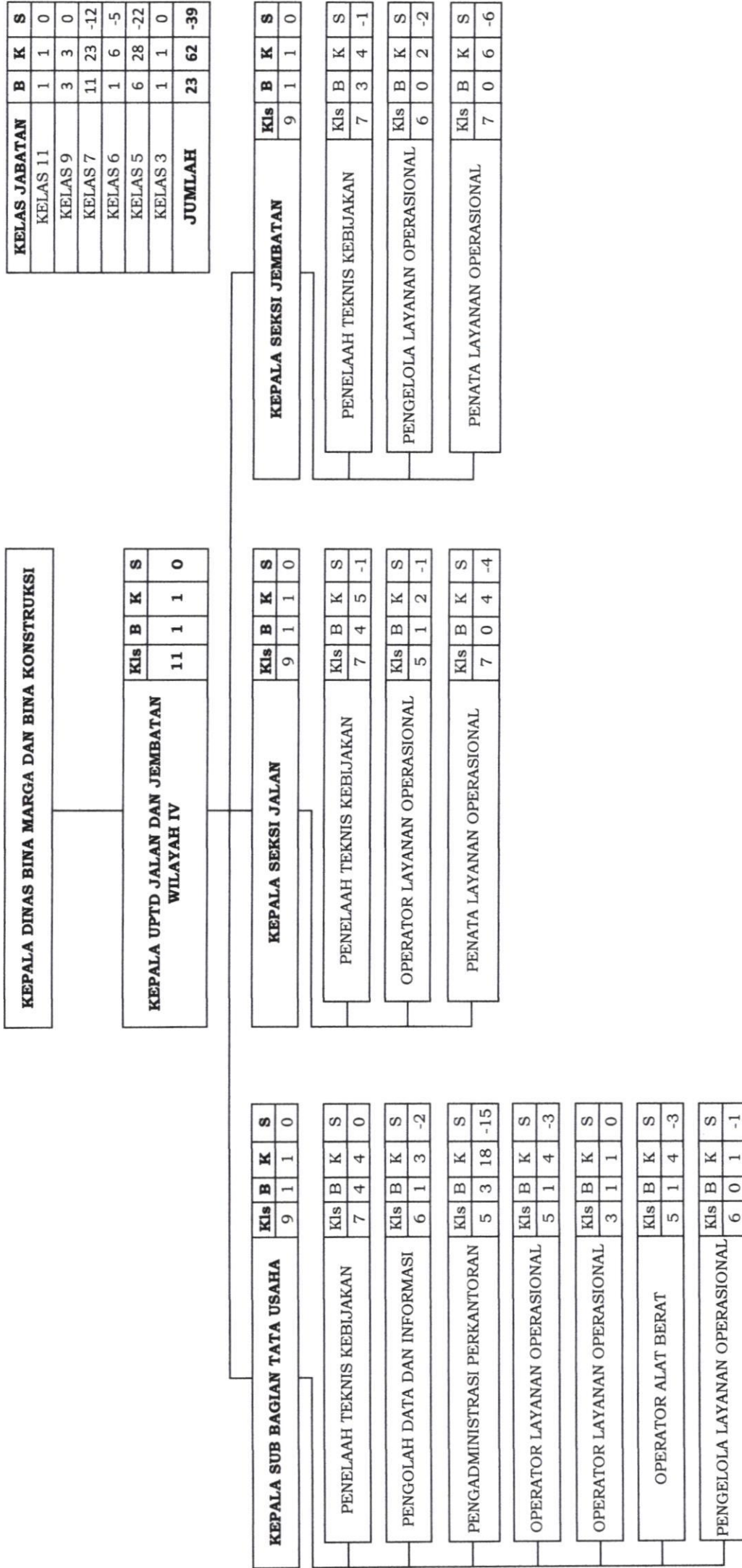
3.3. PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH II DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG



3.4. PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH III DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG

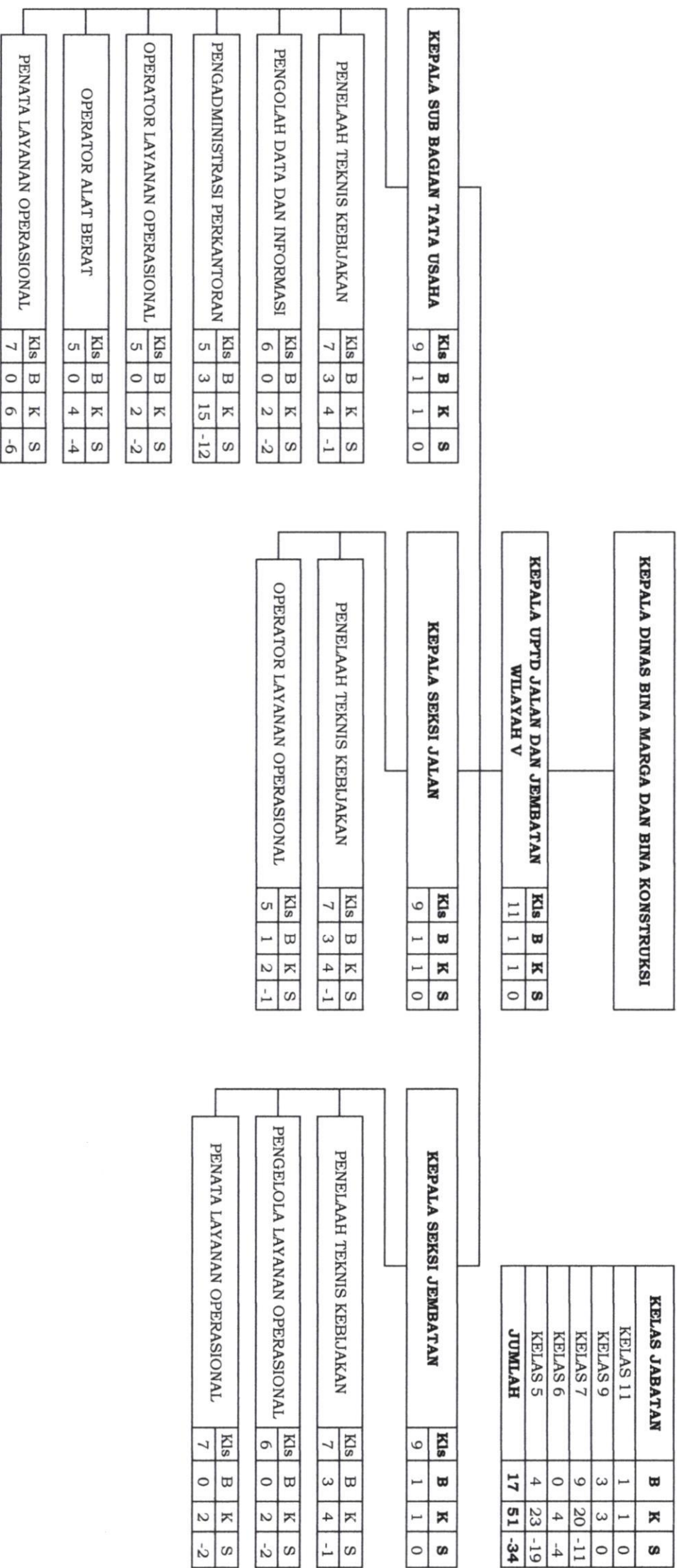


3.5. PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH IV DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG

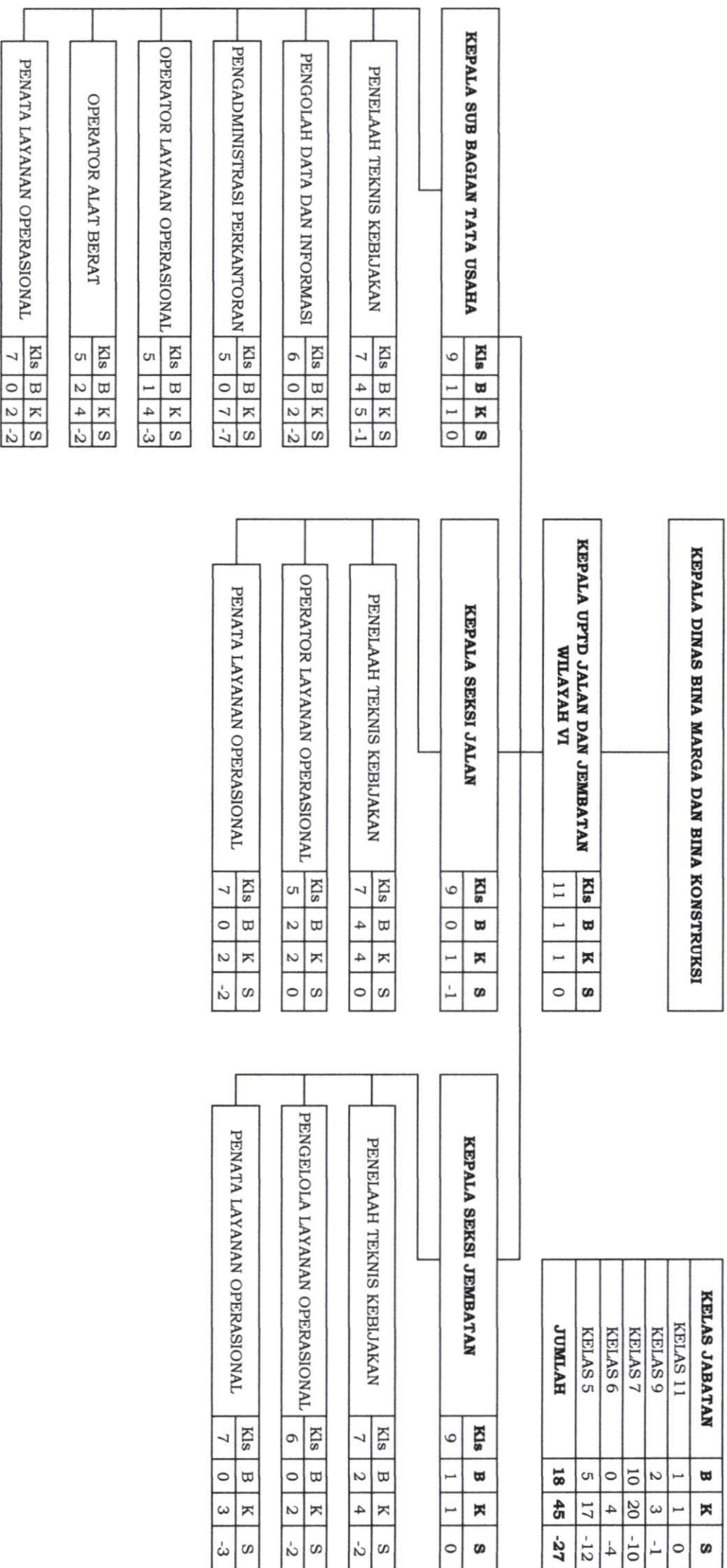


KELAS JABATAN	B	K	S
KELAS 11	1	1	0
KELAS 9	3	3	0
KELAS 7	11	23	-12
KELAS 6	1	6	-5
KELAS 5	6	28	-22
KELAS 3	1	1	0
JUMLAH	23	62	-39

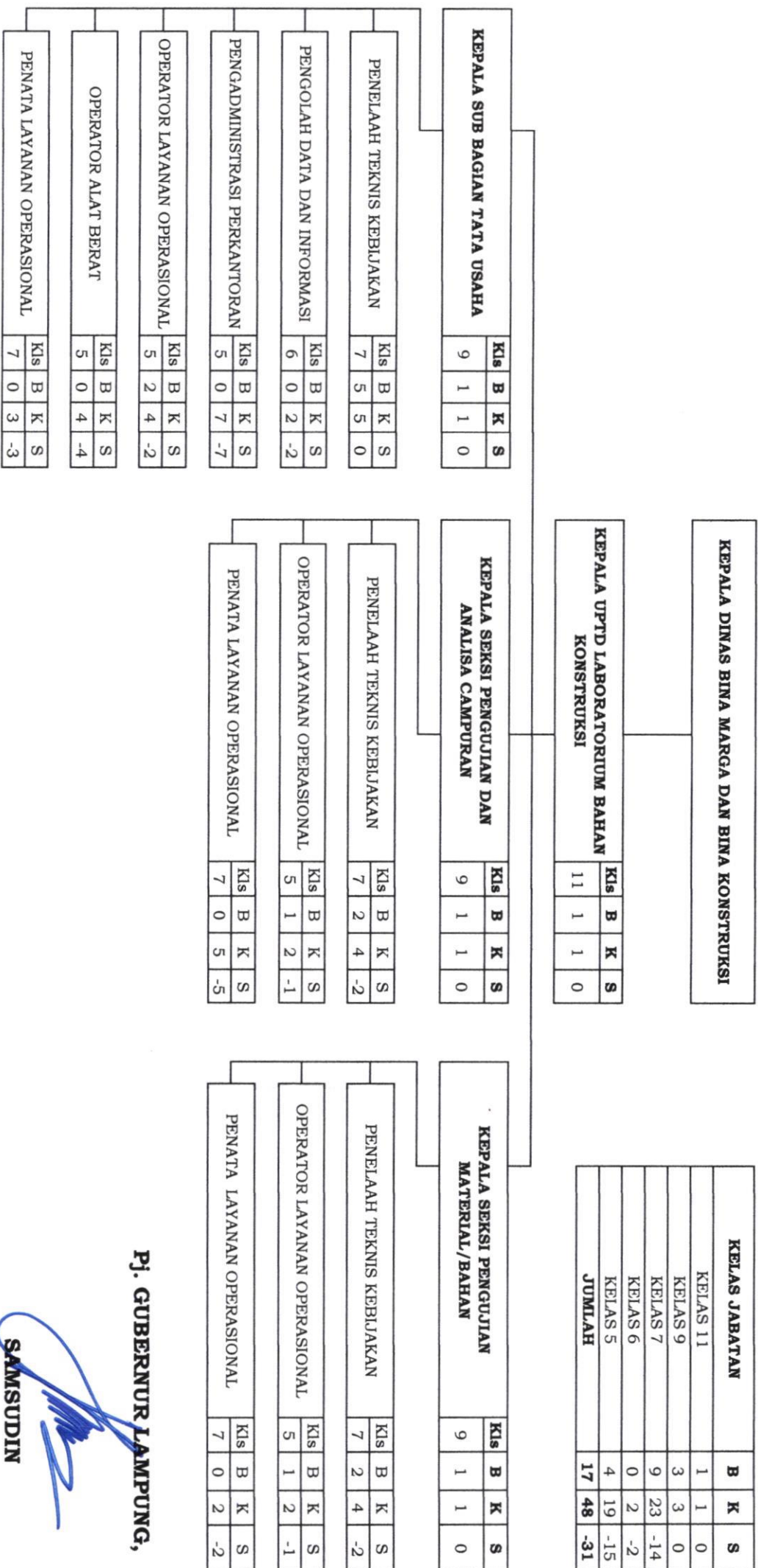
3.6. PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH V DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG



3.7. PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH VI DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG



3.8. PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI DINAS BINA MARGA DAN BINA KONSTRUKSI PROVINSI LAMPUNG



Pj. GUBERNUR LAMPUNG,


SAMSUDIN